

BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran BKKBN sebagai koordinator dalam mengatasi masalah stunting di provinsi Nusa Tenggara Timur telah berjalan dengan baik sejalan dengan teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penerapan koordinasi dalam mengatasi stunting di Nusa Tenggara Timur oleh BKKBN melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan lainya salah satunya satgas stunting provinsi sapai pada tingkat kabupaten atau kota. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tiga indikator yaitu:

1. Kesatuan Tindakan

Dalam konteks kesatuan tindakan, peran BKKBN sebagai ketua pelaksana yang mengkoordinir satgas stunting sangat penting untuk dijalankan agar dapat memperoleh sinerjisitas atau keserasian kerja antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam mengatasi masalah stunting yang ada. Melalui kesatuan tidakan dan koordinasi yang baik pelaksanaan program kerja dalam upaya mengatasi stunting dapat dijalankan dengan baik efisien dan tepat waktu sehingga hali dapat terpenuhi tujuan atau rencananya yang telah disepakati. Dalam mengatasi masalah stunting di Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil wawancara stgas stunting selalu atau stakeholder lainya selalu

terlibat aktif dalam menjalankan peran atau tanggungjawab yang diembankan dalam mengatasi masalah stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses di mana individu ataupun kelompok, organisasi, dan komunitas menciptakan serta menggunakan informasi untuk berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain, terutama pada konteks mengatasi stunting di Nusa Tenggara Timur. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, sebab komunikasi memungkinkan sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Dalam melakukan koordinasi BKKBN memerlukan komunikasi untuk menyampaikan informasi, edukasi kepada Dinas-dinas terkait atau stakeholder dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana aksi percepata penurunan stunting di Provinsi nusa Tenggara Timur

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah tahapan peran yang wajib dikerjakan berdasarkan klasifikasi pekerjaan yang telah ditentukan dimana saling berhubungan erat antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, supaya tidak terjadi overtime maka tiap unit atau

organisasi yang terlibat bisa handle pekerjaan mereka masing-masing dan wajib bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Penbagian kerja dalam mengatasi *stunting* di Nusa Tenggara Timur tentunya sangat diperlukan supaya tidak terjadinya overtime, dengan pembagian kerja ini dapat mempercepat melaksanakan program-program yang ada dalam mengatasi masalah *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.2.Saran

Menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau rekomendasi bagi semua pihak yang terlibat dalam mengatasi masalah *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Satgas *Stunting*

Diharapkan untuk semua yang terlibat dalam mengatasi *stunting* bekerja lebih keras lagi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pemantauan atau pengawasan di tiap kabupaten/kota, karena ada beberapa kabupaten yang persentase angka *stunting* nya masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya

2. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat aktif lagi dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan yang diharuskan melibatkan masyarakat, karena cenderung juga masyarakat ada yang

apatis dengan kegiatan tersebut, sehingga dengan keterlibatan masarakat dapat membatu pemaerintah dalam mengurangi atau mengatasi masalah *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.